

PEMROV RIAU TERIMA PENGHARGAAN APRESIASI DAERAH PEDULI PENGENDALIAN INFLASI



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/pemprov-riau-terima-penghargaan-apr.jpg

Guna menekan dan mengendalikan tingkat inflasi di daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan berfokus pada komoditas komponen inflasi bergejolak (*Volatile Food*). Sebagai informasi, beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food tersebut meliputi beras, daging ayam ras, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah.

Pj Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufik OH mengatakan, dari pada hanya fokus terhadap hasil akhir dari nilai inflasi, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap faktor pembentuk terjadinya harga dipasar.

“Dibutuhkan komitmen dan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan program pengendalian inflasi. Kita perlu fokus terhadap komoditas volatile food yang lebih, agar harga barang-barang tersebut bisa tetap stabil,” ucapnya di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Selasa, (1/10/2024).

Selain itu, untuk menjaga ketersediaan komoditas yang ada di pasar rakyat, penting menurutnya untuk mengoptimalkan kerja sama antar daerah. Khususnya dengan daerah penghasil seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung dan Aceh.

“Hal ini untuk memastikan kelancaran pasokan, karena kita menyadari bahwa Provinsi Riau bukan daerah produsen untuk sebagian besar kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa,” terangnya.

Taufik menjelaskan selain hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan serangkaian upaya guna mengatasi inflasi di Bumi Lancang Kuning ini. Mulai dari pemantauan harga stok dan ketersediaan bahan pokok, melakukan rapat teknis pengendalian inflasi daerah (TPID) bersama OPD lintas sektor.

Pencanangan gerakan menanam, operasi pasar dan gerakan pangan murah, hingga melakukan sidak pasar dan distributor guna memastikan tidak adanya oknum-oknum yang sengaja menahan barang.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Riau juga telah memberikan bantuan transportasi melalui APBD dan sedang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, dan Bank Indonesia,” tutup Plh Sekda.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88113/kenadalikan-tingkat-inflasi-daerah-pemprov-ri.html>, “Kenadalikan Tingkat Inflasi Daerah, Pemprov Riau Akan Fokus Pada Komoditas *Volatile Food*”, 1 Oktober 2024;
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/874779/kendalikan-inflasi-pemprov-riau-fokus-stabilkan-harga-komoditas-volatile-food>, “Kendalikan Inflasi, Pemprov Riau Fokus Stabilkan Harga Komoditas *Volatile Food*”, 2 Oktober 2024.

Catatan:

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024, Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun, untuk bentuk sasaran inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*) dengan tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:

- a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
- b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
- c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).

Pengukuran IHK

IHK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018, IHK dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yaitu

1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau;
2. Kelompok pakaian dan alas kaki;
3. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga;
4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga;
5. Kelompok kesehatan;
6. Kelompok transportasi;
7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan;
8. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya;
9. Kelompok pendidikan;
10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan
11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Mengutip Berita Resmi Statistik No.23/04/Th.XXVII, tanggal 1 April 2024 Pada Maret 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,13. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,17 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,62 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

sebesar 3,56 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen. Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Maret 2024 sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Maret 2024 sebesar 0,93 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2024 sebesar 1,77 persen; inflasi m-to-m sebesar 0,23 persen; dan inflasi y-to-d sebesar 0,57 persen.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau